ABSTRAK

MUHAMMAD RAHMAN, NPM. 16120162 "*Upaya Peningkatan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Kabupaten Banjar*". Bimbingan Bapak Murdiansyah Herman, sebagai pembimbing Utama dan Ibu Fika Fibriyanita sebagai Co Pembimbing.

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis upaya peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Banjar serta menganalisis faktor hambatan dan upaya mengatasi faktor hambatan peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Banjar.

Metode penelitian menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi kepada 4 (empat) orang informan. Sampel ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sumpling*. Analisis data menggunakan dengan cara Reduksi data (*data reduction*), interpretasi data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conlusion drawing/verification*).

Hasil penelitian menunjukan bahwa menganalisis upaya peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Banjar sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih ada terdapat beberapa kendala dalam upaya peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Banjar yang harus diperbaiki kedepannya.

Kata kunci: *Kinerja, Aspirasi, DPRD*

ABSTRACT

MUHAMMAD RAHMAN, NPM. 16120162 "*Efforts to Improve the Performance of Regional People's Representative Council in Channeling Community Aspirations in Banjar Regency". Guidance by Mr*. Murdiansyah Herman *as the Main Advisor and Ms*. Fika Fibriyanita *as the Co-Advisor*.

The purpose of this study was to analyze the Efforts to Improve the Performance of Regional People's Representative Council in Channeling Community Aspirations in Banjar Regency and analyze the obstacle factors and efforts to overcome obstacle factors in the Efforts to Improve the Performance of Regional People's Representative Council in Channeling Community Aspirations in Banjar Regency.

The research method uses a qualitative approach with the type of descriptive research. Data were collected using interview techniques and documentation to 4 (four) informants. The sample is determined using a purposive

sumpling technique. Data analysis uses data reduction, data interpretation, and conclusion drawing (verification).

The results showed that analyzing the Efforts to Improve the Performance of Regional People's Representative Council in Channeling Community Aspirations in Banjar Regency had been going quite well, but there were still some obstacles in the Efforts to Improve the Performance of Regional People's Representative Council in Channeling Community Aspirations in Banjar Regency which had to be improved in the future.

***Keywords**: Performance, Aspirations, DPRD*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Merupakan lembaga legislatif tempat wakil rakyat membuat undang–undang ditingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Kinerja penyelenggara otonomi daerah yaitu Pemerintah Daerah dan DPRD harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat luas. Salah satunya yaitu membuat kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui komunikasi politik antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat.

Kegiatan DPRD melalui Sekretariat DPRD, dengan unsur Pelayanan kepada pemimpin dan anggota DPRD di bidang administrasi, perlengkapan dan rumah tangga, keuangan, rapat dan risalah serta kunjungan dan kegiatan lainnya, maka sudah menjdai suatu kewajiban bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar untuk meningkatkan kinerja seluruh karyawan dan karyawati dilingkungan kerjanya sesuai tugas dan tanggung jawab masing – masing.

Berdasarkan Pemaparan di atas Tugas dan wewenang anggota DPRDMenyalurkan aspirasi Masyarakat Sebagai Salah Satu tanggung jawab anggota DPRD kepada para konstituen (masyarakat) sehingga menarik diangkat sebagai bahan penelitian dengan judul: “UPAYA PENINGKATAN KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MEYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DI KABUPATEN BANJAR”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya peningkatan pelayanan kinerja anggota DPRD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Banjar?
2. Apa saja faktor yang menjadi hambatan dalam upaya peningkatan pelayanan kinerja anggota DPRD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Banjar?

3. Upaya apa saja untuk mengatasi faktor hambatan dalam upaya peningkatan pelayanan kinerja anggota DPRD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Banjar?

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cendrung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. objek penelitian yang didapat melalui : Penelitian kepustakaan (library Research), Penelitian Lapangan (Field Research), bahan dan data-data berkenaan dengan objek penelitian

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif. Sedangkan jenis data adalah data kualitatif. Metode ini digunakan dengan pertimbangan bahwa metode ini relevan dengan materi penulisan skripsi, penelitian dilakukan hanya bersifat deskriptif.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian berlokasi di DPRD Kabupaten Banjar, yang beralamat di jalan Ahmad Yani No.3 Martapura, Kode Pos 70611, Kalimantan Selatan.

D. Sumber Data (Informan)

informan yang dimaksud adalah : Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Anggota DPRD Kabupaten Banjar, Beberapa masyarakat di Kabupaten Banjar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah karena pada umumnya data yang terkumpul digunakan dalam rangka analisis penelitian dan pengumpulan data dilakukan dengan cara kepustakaan atau pengambilan data sekunder yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten Banjar mengenai Upaya Peningkatan Pelayanan Kinerja Anggota DPRD dalam Menyalurkan keluhan Masyarakat di Kabupaten Banjar.

F. Definisi Konsep

Definisi Konsep adalah suatu cara untuk mengukur dimensi-dimensi, sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui, parameter yang digunakan sebagai pendukung untuk dianalisa mengacu teori kinerja organisasi. adapun parameternya adalah sebagai berikut: Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Akuntabilitas.

G. Analisis Data

Analisa data yaitu data yang harus segera dianalisis setelah dikumpulkan dan dalam bentuk laporan lapangan. beberapa tahap, yaitu : Mereduksi data (Data Reduction), Menyajikan data (Data Display), Membuat kesimpulan (Conclusion Drawing/verification).

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Berdirinya Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar

Sejak tahun 1826 dibuat perjanjian perbatasan antara Sultan Adam dengan pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1835 sewaktu pemerintahan Sultan Adam Alwasiqubillah telah dibuat untuk pertama kalinya ketetapan hukum tertulis dalam menerapkan hukum Islam di Kesultanan Banjar yang dikenal dengan Undang-Undang Sultan Adam. Tahun 1855, daerah Kesultanan Banjarmasin merupakan sebagian dari *De zuider-afdeeling van Borneo* termasuk sebagian daerah Dusun (Tamiang Layang) dan sebagian Tanah Laut. Dari beberapa sumber disebutkan ada beberapa tempat yang menjadi kedudukan raja (istana pribadi Sultan) setelah pindah ke Martapura, seperti Kayu Tangi, Karang Intan dan Sungai Mesa.

Pembagian administratif tahun 1898 menurut Staatblaad tahun 1898 no. 178, *Afdeeling Martapoera* dengan ibukota Martapura terdiri dari :

1. *Onderafdeeling* Martapoera terdiri dari:
    a. Distrik Martapura.
2. *Onderafdeeling* Riam Kiwa dan Riam Kanan terdiri dari :
    a. Distrik Riam Kiwa
    b. Distrik Riam Kanan
3. *Onderafdeeling* Tanah Laoet terdiri dari :
    a. Distrik Pleihari
    b. Distrik Maluka
    c. Distrik Satui

DPRD pada tanggal 27 Februari 1952, mengusulkan perubahan nama Kabupaten Banjarmasin menjadi Kabupaten Banjar yang disetujui dengan Undang-undang Darurat 1953, kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang No. 27 Tahun 1959. Dalam perjalanannya, wilayah Kabupaten Banjar mengalami perkembangan, dengan beberapa kali mengalami pemekaran kecamatan sehingga sekarang terbentuk 19 kecamatan di Kabupaten Banjar, yaitu :

1. Aluh Aluh
2. Aranio
3. Astambul
4. Beruntung Baru (Perda no.13 Tahun 2003)
5. Gambut
6. Karang Intan
7. Kertak Hanyar(Perda no. 6 Tahun 2008)
8. Martapura
9. Martapura Barat (Perda no. 13 Tahun 2003)
10. Martapura Timur (Perda no. 13 Tahun 2003)
11. Mataraman (PP No. 28 Tahun 1995)
12. Paramasan (PP No.12 Tahun 2006)
13. Pengaron
14. Sambung Makmur (Perda no. 13 Tahun 2003)
15. Simpang Empat (Perda no. 5 Tahun 2008)
16. Sungai Pinang

17. Sungai Tabuk
18. Telaga Bauntung (Perda no. 5 Tahun 2008)
19. Tatah Makmur (Perda no. 6 Tahun 2008)
20. Cintapuri Darussalam

2. DPRD Kabupaten Banjar

Dalam upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat , DPRD kabupaten banjar telah melakukan upaya optimal dengan memaksimalkan kinerja DPRD yang tentunya berada dalam tiga koridor fungsi tersebut.

Tabel Nama Ketua DPRD Kabupaten Banjar tahun 1950 – 2019

No.	Nama Pejabat	Tahun Jabatan	Keterangan
1.	K.H. Hasan Tjorong	1950 – 1951	DPRD S
2.	M. N. Manuar	1951 – 1956	DPRD S
3.	H. Ahmad Sanusi	1956 – 1958	DPRD P
4.	Zamain Marlin	1958 – 1960	DPRD Pemilu 1955
5.	H. Baseri, BA	1960 – 1965	DPRD G
6.	M. Basiri	1965 – 1970	DPRD
7.	M. Yoesran Effendi	1970 - 1971	DPRD
8.	M. Yoesran Effendi	1971 – 1973	DPRD Pemilu 1971
9.	Tatang Suyoto	1973 – 1977	DPRD Pemilu 1971
10.	Tatang Suyoto	1977 – 1982	DPRD Pemilu 1977
11.	Masrumsyah	1982 – 1987	DPRD Pemilu 1982
12.	Drs. H. Masykur	1987 – 1992	DPRD Pemilu 1987
13.	H. M. Roeslan	1992 – 1997	DPRD Pemilu 1992
14.	H. Parlin Siswanto	1997 – 1999	DPRD Pemilu 1997
15.	H. Rusbandi	1999 – 2004	DPRD Pemilu 1999
16.	H. Zainal Arifin, SH, MH	2004 – 2009	DPRD Pemilu 2004
17.	H.Rusli, S.AP, MM	2009 – 2014	DPRD Pemilu 2009
18.	H. Rusli, S.Ap, MM	2014 – 2019	DPRD Pemilu 2014
19.	H. Muhammad Rofiqi, S.H.	2019 – 2024	DPRD Pemilu 2019

VISI

"mewujudkan DPRD kabupaten banjar sebagai lembaga legislatif yang kuat, merakyat, dinamis dan transparan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat guna mencapai kabupaten banjar maju , sejahtera & barokah"

MISI

1. Meningkatkan kualitas, kapabilitas dan kapasitas anggota DPRD Kabupaten Banjar dan elemen DPRD Kabupaten Banjar lainnya.
2. Meningkatkan optimalisasi fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan-kebijakan publik.
4. Berperan aktif dalam meningkatkan produk kebijakan publik yang solutif atau kebijakan berbasis masyarakat dan kebijakan untuk

mempercepat terwujudnya Kabupaten Banjar maju sejahtera & barokah.

5. Meningkatknya partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, bersih dan akuntabel.

Tabel Profil

No	Nama	Fraksi	Alat Kelengkapan
1	H. Muhammad Rofiqi, SH	Gerindra	Ketua
2	H. Agus Maulana	Golkar	Wakil Ketua
3	Akhmad Rizanie Ansari, ST	Nasdem	Wakil Ketua
4	H. A. Zacky H, SH, MH	Persatuan Pembangunan	Wakil Ketua
5	Drs. Kamaruzzaman	Golkar	Ketua Kom. I
6	Siti Zulaikha, S.Ag	Persatuan Pembangunan	Wakil Ketua Kom. I
7	H. Ismail Hasan, SH.I	Demokrat	Sekretaris Kom. I
8	H. M. Solikin, S.Sos	Nasdem	Anggota Kom. I
9	Syarkawi, S.Sos	Gerindra	Anggota Kom. I
10	H. Wahyudin, SH	Kebangkitan Demokrasi Indonesia	Anggota Kom. I
11	Ahdiat Nurhan, S.PI	Amanat Sejahtera Rakyat	Anggota Kom. I
12	Soraya, SH	Amanat Sejahtera Rakyat	Anggota Kom. I
13	Rahmat Saleh, SH.I	Golkar	Anggota Kom. I
14	H. Pribadi Heru Jaya, S.Pi	Kebangkitan Demokrasi Indonesia	Ketua Kom. II Anggota Badan Anggaran
15	M. Syahrani, SH, MM, MH	Gerindra	Wakil Ketua Kom. II

16	Hj. Mukarramah, S.Kep	Golkar	Sekretaris Kom. II
17	Hj. Helda Rina	Gerindra	Anggota Kom. II
18	Hj. Ratna Hartati	Kebangkitan Demokrasi Indonesia	Anggota Kom. II
19	Derwana Farmei Golles JN	Nasdem	Anggota Kom. II
20	Herlina Anggraini	Amanat Sejahtera Rakyat	
21	Saidan Pahmi, S.Pd, SH	Demokrat	Anggota Kom. II
22	Mulkan, S.Sos, MH	Persatuan Pembangunan	Anggota Kom. II
23	Ratu Juriah	Golkar	Anggota Kom. II
24	Irwan Bora,SH, MM	Gerindra	Ketua Kom. III
25	M. Hasan Hamdan	Amanat Sejahtera Rakyat	Wakil Ketua Kom. III
26	Hj. Rusmini, SE, M.Si	Demokrat	Sekretaris Kom. III
27	Mardani	Nasdem	Anggota Kom. III
28	Lauhul Mahfudz, SH	Nasdem	Anggota Kom. III
29	Ruslan, S.Ap	Gerindra	Anggota Kom. III
30	Hermani, S.Pd.I	Kebangkitan Demokrasi Indonesia	Anggota Kom. III
31	Yunita Ningsih, SH	Kebangkitan Demokrasi Indonesia	Anggota Kom. III
32	Muhammad Yunani D	Amanat Sejahtera rakyat	Anggota Kom. III
33	Muhammad Zaini	Persatuan Pembangunan	Anggota Kom. III
34	H. Abd. Razak, S.IP, M.AP	Golkar	Anggota Kom. III

35	Ahmad Sarwani, S.Sos	Nasdem	Kertua Kom. IV
36	Hj. Diah M B, S.I.Kom	Kebangkitan Demokrasi Indonesia	Wakil Ketua Kom. IV
37	H. Muhammad Iqbal, S.HI	Gerindra	Sekretaris Kom. IV
38	Abdussaman, S.AP	Nasdem	Anggota Kom. IV
39	Syarifah Sakinah	Gerindra	Anggota Kom. IV
40	M. Zaini, M.Pd	Kebangkitan Demokrasi Indonesia	Anggota Kom. IV
41	Hamdan	Amanat Sejahtera Rakyat	Anggota Kom. IV
42	Fitriya, S.Pd.I	Persatuan Pembangunan	Anggota Kom. IV
43	H. GT. Abdurrahman, SE	Golkar	Anggota Kom. IV
44	Hj. Rusdiana, SE	Golkar	Anggota Kom. IV
45	Muhammad Maerbawi, SP	Demokrat	Anggota Kom. IV

B. Hasil Penelitian

1. Produktifitas

Melalui prinsip desentralisasi, pemerintah pusat telah melimpahkan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Hal ini sebagai tindak lanjut amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas bantuan.

Untuk mengetahui produktifitas kinerja DPRD Kabupaten Kabupaten banjar periode 2014-2019 penulis mewawancarai ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten banjar, beliau mengatakan:

"Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar melakukan kegiatan RESES, anggota dewan melakukan kegiatan musyawarah langsung turun ke lapangan dengan para konstituen, kemudian ada lagi cara anggota DPRD yang menerima audiensi dari masyarakat yang datang

ke kantor DPRD Kabpaten Banjar". (Wawancara Tanggal 13 Juli 2020)

Penulis kemudian mewawancarai informan masyarakat Ibu. N.R. warga kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar mengatakan :

"Pekerjaan saya adalah berjualan dimana saya banyak bertemu dengan banyak orang termasuk pejabat-pejabat dan anggota dewan, beberapa anggota dewan pernah terlihat turun langsung bahkan saya juga pernah ditemui untuk menanyakan keluhan dan saran bagi pemerintah. Namun itu jarang dari 5 tahun hanya sekali saja". (Wawancara tgl 15 – 07 - 2020)

penulis melihat bahwa produktifitas anggota dewan dalam mengeluarkan peraturan daerah di DPRD Kabupaten Banjar periode 2019-2024 dapat dikatakan belum produktif, karena jumlahnya masih kurang dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat yang memerlukan peraturan daerah untuk menjalankan kebijakan. Penulis menganalisis lemahnya produktifitas ini disebabkan kurang fokusnya para anggota dewan dalam membahas materi perda yang ada. Banyaknya kepentingan politik dalam suatu organisasi dewan menjadi salah satu penyebab produktifitas dewan dalam mengeluarkan perda menjadi lemah.

2. Kualitas Layanan

Pentingnya pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat mendorong para wakil rakyat untuk mengadakan kunjungan secara rutin ke daerah pemilihannya masing-masing agar dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh konstituen. Kunjungan kerja tersebut telah ditentukan dalam tata tertib DPRD yaitu pada masa reses.

Untuk mengetahui bagaimana pelayanan yang diberikan anggota dewan dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat penulis mewawancarai salah satu informan masyarakat, dikatakan Ibu. S.T. beliau mengatakan:

"saya pernah bertemu dengan beberapa anggota dewan di wilayah saya, menurut saya biasa saja, mereka hanya sekedar menyapa dan tebar pesona saja. Jarang menanyakan kepada kami tentang keluhan kami, kalau kami punya keluhan dan mengeluhkannya jawaban paling sering didengar adalah 'nanti akan saya sampaikan' tapi hasilnya tidak ada". (Wawancara Tgl 15 07 2020)

Hal senada dikatakan bapak. J.H. beliau mengatakan :

"Yaaahh.. menurut saya anggota itu cuma manis diawalnya saja tapi setelah jadi tidak begitu lagi. kalau lewat kaca mobil dinaikkan. Waktu pencalonan, kalau boleh tidak pakai kaca pasti begitu". (Wawancara Tgl 15 07 2020)

Mengenai kualitas layanan yang diberikan para anggota dewan, terlihat bahwa masyarakat masih ada yang kurang puas dengan pelayanan yang diberikan. Dimana anggota dewan dianggap seharusnya membawa dan menyalurkan aspirasi masyarakat bukan hanya di dalam parlemen saja,

namun juga dengan sikap dan layanan mereka pada kehidupan sehari-hari, pelayanan masyarakan bukan hanya bersifat formal saja di kantor, namun terutama dapat berupa pelayanan informal dalam keseharian.

3. Responsivitas

Untuk mengetahui bagaimana responsivitas yang dilakukan anggota dewan dalam menjaring, menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat penulis mewawancarai salah satu anggota DPRD Kabupaten Banjar, beliau mengatakan:

Salah satu respon yaitu memperjuangkan aspirasi masyarakat, dengan menyampaikan hasil reses di dalam rapat peripurna untuk disampaikan sebagai pokir-pokir dewan. Karena salah satu fungsi atau tugas DPRD adalah pengawasan dan penganggaran, dalam pengembangannya maka bisa dimasukan anggaran dalam rencana pembangunan". (Wawancara Tanggal 13 Juli 2020)

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis melihat bahwa ada hubungannya antara kualitas pelayanan anggota dewan dan responsivitas apabila layanannya buruk begitu juga dengan tingkat responsivitasnya hal tersebut dikatakan oleh informan ibu ST beliau berkata:

"Saya rasa kepekaan anggota-anggota dewan juga tidak begitu bagus karena pelayanannya juga tidak bagus hanya mementingkan jabatan saja". (Wawancara Tanggal 15 Juli 2020)

Hal tersebut diperkuat oleh penuturan dari Bapak J.D anggota masyarakat yang pernah mengikuti reses anggota dewan, beliau berkatan:

"Saya pernah ikut reses anggota dewan di dapil saya. Kegiatan tersebut menurut saya hanya menghabiskan uang saja, hanya sekedar formalitas saja, makanya sedikit yang hadir, kalaupun ada hanya untuk meminta uang duduk atau makan, karna pembahasannya tidak jelas dan tidak ada hasil apa-apa. Hanya dipasang baliho, bicara dan foto kemudian makan". (Wawancara Tanggal 15 Juli 2020)

Responsivitas merupakan reflex dari seorang anggota dewan dalam melihat situasi dan kondisi serta keluhan masyarakat yang sedang terjadi, namun dari hasil penelitian dengan wawancara dengan para informan ditemui bahwa kualitas layanan dipengaruhi dari responsifitas anggota dewan, dengan lemahnya layanan kepada masyarakat otomatis, responsivitas anggota dewan juga kurang baik. Oleh sebab itu penulis melihat bahwa pentingnya pengembangan respon dari anggota dewan dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Kepekaan anggota dewan dalam sebuah permasalahan menjadi kunci yang penting dalam rangka memajukan pelayanan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

4. Akuntabilitas

Indikator Akuntabilitas yaitu Indikator yang memuat tanggungjawab anggota DPRD Kabupaten Banjar setelah pelaksanaan reses yaitu membuat laporan reses untuk di pertanggung jawabkan pada Sidang Paripurna, selain itu Indikator ini juga memuat kontrol dan

pengawasan aspirasi-asprasi konstituen tersebut oleh Anggota dewan sehingga sampai pada pembahasan aspirasi tersebut menjadi sebuah kebijakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat.

Pentingnya kualitas dipengaruhi dari rekrutmen oleh partai politik pada saat menerima calon anggota dewan. Pada penelitian ini, penulis juga mendapatkan bahwa akuntabilitas yang dilakukan anggota dewan bukan hanya pada saat menyusun draft laporan namun juga memberikan bukti yang nyata dari aspirasi masyarakat yang disampaikan pada saat reses, dengan dilaksanakannya aspirasi masyarakat pada saat reses akan membuktikan akuntabilitas yang baik.

5. Faktor-Faktor Penghambat

Beberapa faktor penghambat ketika anggota DPRD Kabupaten Banjar bertemu dengan konstituen adalah sebagai berikut :

a. Waktu Dalam Melakukan Pertemuan Dengan Masyarakat
b. Tingkat Partisipasi Masyarakat
c. Dana Yang Terbatas Dari Pemerintah Dalam Merealisasikan Pembangunan

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Produktifitas Anggota DPRD Kabupaten Banjar, dinilai dari jumlah produktifitas perda yang dikeluarkan, dari hasil penelitian ada 20 lebih perda yang dikeluarkan selang 5 tahun. Tentunya jumlah perda menyesuaikan dengan kebutuhan didaerah.
2. Kualitas layanan yang ditunjukkan para Anggota DPRD dalam melayani aspirasi masyarakat di Kabupaten Banjar menurut hasil penelitian disimpulkan, belum berkualitas optimal, dimana rata- rata informan masyarakat menilai sikap anggota dewan tidak mencerminkan menerima aspirasi mereka.
3. Responsivitas juga ikut terpengaruh oleh kualitas layanan dimana dari hasil penelitian, bahwa sebagian besar anggota dewan kurang memiliki kepekaan dengan keluhan masyarakat.
4. Dari aspek akuntabilitas, pelaksanaan reses oleh anggota dewan berjalan sesuai dengan program. Namun kuantitas belum menjamin kualitas reses tersebut. Karena kualitas reses yang baik tentunya diikuti dengan aspirasi yang tersampaikan dan terlaksanakan oleh Anggota DPRD..
5. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi anggota DPRD Kabupaten Banjar dalam menyerap aspirasi konstituen di masing-masing daerah pemilihan, diantaranya adalah masalah waktu reses yang singkat, jadwal kegiatan reses yang sering berbenturan dengan undangan agenda yang dibuat oleh instansi atau lembaga lainnya secara mendadak yang harus di hadiri oleh anggota DPRD Kabupaten

Banjar sehingga menganggu jadwal reses, selain itu partisipasi masyarakat yang masih rendah, ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran msyarakat dalam memenuhi undangan reses yang dilakukan angota DPRD Kabupaten Banjar, kemudian faktor ketersediaan anggaran reses juga cukup mempengaruhi kuantitas dari peserta reses karena berkaitan dengan konsumsi dan akomudasi dari peserta reses.

B. Saran

1. DPRD Kabupaten Banjar agar lebih memperhatikan, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memenuhi tuntutan itu diperlukan kinerja DPRD Kabupaten Banjar.
2. sebagai salah sartu lembaga yang memiliki integritas untuk memutuskan dan menghasilkan kebijakan publik hendaknya secara sungguh sungguh memperhatikan aspirasi masyarakat, sebelum mengambil atau memutuskan suatu kebijakan, dengan demikian kebijakan publik yang dihasilkan dapat diterima oleh masyarakat banyak. Hendaknya Pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD Kabupaten Banjar mendorong para anggota dewan untuk mengadakan kunjungan secara rutin ke daerah pemilihannya masing-masing agar dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh konstituen.
3. harus mampu memanfaatkan waktu reses mereka semaksimal mungkin dengan melakukan dialog dengan masyarakat dan turun langsung kelapangan, sehingga keinginan masyarakat atau aspirasi yang di usulkan masyarakat benar-benar sesuai dengan fakta bukan rekayasa belaka. Serta Perlu ada kalender masa reses yang dijadwalkan oleh Badan Musyawarah DPRD yang harus ditaati oleh seluruh anggota DPRD sehingga ada kesesuaian agenda reses dengan agenda-agenda lainnya di DPRD, dan penganggaran khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan anggaran reses anggota DPRD tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Agus Dwiyanto, 2006, *Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Public*. Yogyakarta: UGM Press.

Agus Dwiyanto. 2008. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rinata Cipta. Bandung: Mandar Maju

Cangara, Hafied. 2009. *Komunikasi Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Cipto, Bambang. 2005. *DPR dalam Era Pemerintahan Modern-Industrial*. Jakarta: PT. Grafindo Persada

Etzioni, Amitai. 2005. *Organisasi-Organisasi Modern.* Alih bahasa oleh Suryatim. Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama Universitas Indonesia dan Pustaka Bradjaguna.

Keban, Jeremias.T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media.

Kumorotomo,Wahyudi. dan Agus,Subando Margono. 2011. *Sistem informasi manajemen dalam organisasi-organisasi publik* : Gadjah Mada University Press

Lumolos Johny. *Penguatan Kapasitas DPRD di Era Reformasi.* Lepsindo

Mahsun, Mohamad, *2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik,*. Penerbit BPFE,Yogyakarta.

Marijan K, 2010. *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru* .Jakarta: Kencana Predana Media Group.

Napitupulu, Paimin. 2007. *Menuju Pemerintahan Perwakilan*. Bandung: PT. Alumni.

Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Public.* Bandung: Alfabeta.

Ruky, Ahmad. 2002. *Sistem Manajemen Kinerja*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Simanjuntak. 2005. *Manajemen Dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sirajuddin, dkk. 2006. *Membangun Konstituen Meeting: Mempertemukan Kepentingan Daerah dengan Keterbatasan Wewenang DPD.* Jakarta: YAPPIKA dan MCW.

Steers Richard. M.2005. *Efektivitas Organisasi. (Terjemahan)*. Jakarta: Erlangga.

Uno, Hamzah.B, dan Nina Lamatenggo. 2012. *Teori Kinerja Dan Pengukurannya.* Jakarta: PT. Bumi Aksara.

PERATURAN

Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang kemerdekaan mengeluarkan pendapat di muka umum*.Jakarta.

Republik Indonesia. 2004. *Undang-unndang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.

Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah*. Jakarta.

Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah*. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.* Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.

JURNAL

Anggraeny, P. R. A. (2016). *Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Perempuan Periode Tahun 2014-2019 Ditinjau Dari Aspek Legislasi (Studi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro)*. Bandar Lampug: Fisip Universitas Lampung.

Annas, A., & Anirwan, A. (2019). *Upaya Peningkatan Kinerja DPRD Kabupaten Soppeng*. Journal of Governance and Local Politics, 1(2), 82-99.

Juni, Marten Wahyudi. 2019. *Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat*. JURNAL POLITICO, 8(3).

Marwati, Lilis. 2008. '*Studi tentang Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Dalam Menyikapi Aspirasi Masyarakat*'. *Skripsi*. Universitas Yapis Papua, Papua.

Salman, Muhammad. 2009. '*Analisis Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008'.* Tesis. Universitas Sumatera Utara, Medan.